

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Indonesia adalah sebuah Negara kepulauan yang berdaulat dan menganut sistem pemerintahan yang cukup baik yang dikenal sebagai demokrasi. Dengan adanya sistem demokrasi ini masyarakat dapat melakukan berbagai kegiatan yang mampu mempengaruhi segala keputusan pemerintah, agar kebijakan yang nantinya akan diambil dapat dirasakan dengan baik oleh rakyat. Demi terwujudnya hal tersebut, maka perlu adanya sebuah lembaga atau organisasi untuk menyalurkan aspirasi masyarakat yaitu partai politik.

Partai politik adalah salah satu komponen yang penting dalam dinamika perpolitikan sebuah bangsa. Partai politik dipandang sebagai salah satu cara seseorang atau sekelompok individu untuk meraih kekuasaan. Argumen seperti ini sudah biasa kita dengar di berbagai media massa dan dalam seminar-seminar yang kita ikuti khususnya yang membahas tentang partai politik. Menurut Ismail Gani (1984:14) Secara etimologi politik berasal dari kata polis (Yunani) yang berarti kota atau negara kota. Kemudian diturunkan kata-kata *polities* yang berarti warga negara, "*politike te ckne*" berarti kemahiran politik dan *politike episteme* yang berarti ilmu politik. Secara istilah politik adalah usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi.

Menurut Budiarto (2010:403-404) Partai politik merupakan sebuah wadah dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang melakukan segala aktivitas kepartaian demi terwujudnya tujuan bersama. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Menurut Gani (dalam Sigmund Neumann 1984:112) menyebutkan bahwa Partai Politik adalah organisasi dari aktivis-aktivis politik yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat atas dasar persaingan dengan suatu golongan atau golongan-golongan lain yang mempunyai pandangan yang berbeda.

Menurut Budiarjo (2010:403-404) Partai politik merupakan sebuah wadah dimana didalamnya terdapat sekelompok orang yang melakukan segala aktivitas kepartaian demi terwujudnya tujuan bersama. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Partai politik era modern dimaknai sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama.

Partai politik mempunyai peranan penting dalam sebuah kompetisi pemilihan umum, karena fungsi utama dari partai politik itu sendiri untuk mencari kekuasaan, mendapatkan kekuasaan serta mempertahankan kekuasaan. Cara partai politik memperoleh kekuasaan yaitu dengan cara berpartisipasi dalam pemilihan umum. Menurut Budiardjo (2009:410) menyatakan bahwa partai politik berfungsi sebagai sarana komunikasi, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan sarana pengelola konflik.

Menurut Subakti (2010:149), Partai politik hadir ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk mencari serta mempertahankan guna mewujudkan progamprogam yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Cara yang digunakan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan adalah ikut serta dalam pemilihan umum.

Fungsi partai politik sebagai sarana rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah kepemimpinan baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Untuk kepentingan internalnya, setiap partainya butuh kader-kader yang berkualitas, karena hanya dengan kader yang demikian ia akan menjadi partai yang mempunyai kesempatan paling besar untuk mengembangkan diri dengan mempunyai kader-

kader yang baik, cerdas, partai tidak akan sulit menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang untuk mengajukan calon untuk masuk ke bursa kepemimpinan nasional (Meilandi, 2018 :31-43).

Menurut Subakti,(2010:150), Rekrutmen politik merupakan seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya. Fungsi rekrutmen merupakan kelanjutan dari fungsi mencari dan mempertahankan kekuasaan. Selain itu, fungsi rekrutmen politik sangat penting bagi kelangsungan sistem politik sebab tanpa elite yang mampu melaksanakan peranannya, kelangsungan hidup sistem politik akan terancam Partai politik di Indonesia masing-masing memiliki cara sendiri untuk merekrut kaderkader dalam keanggotaan struktur partai politik. Selain itu setiap partai politik merekrut untuk dijadikan dalam keanggotaan di kursi parlemen. Parpol merekrut berdasarkan aturan-aturan yang dimiliki oleh parpol tersebut yang berkaitan dengan perekrutan, baik keanggotaan struktur harian parpol maupun keanggotaan dalam penentuan daftar calon tetap anggota legislatif.

Menurut Kesuma (2015 : 1) ada tiga indikator dalam melakukan rekrutmen. Pertama adalah melihat nilai-nilai dan pengaruh yang ada di masyarakat, kedua adalah pola rekrutmen yang dilakukan oleh partai politik bisa mempengaruhi masyarakat dan yang terakhir pola rekrutmen dapat melihat dari perubahan dalam sebuah masyarakat politik.

Dalam melakukan rekrutmen politik, setiap partai politik memiliki metode yang berbeda-beda. Hal ini tentunya didasarkan pada perbedaan ideologi, garis perjuangan partai hingga proyek partai yang belum tentu sama antara partai satu dengan yang lainnya. Perbedaan-perbedaan inilah yang nantinya menentukan metode yang akan digunakan partai politik dalam melakukan rekrutmen politik. Rekrutmen politik didalam pelaksanaannya memiliki

keragaman yang tiada terbatas, walaupun memiliki dua cara khusus yaitu seleksi pemilihan melalui ujian serta latihan dapat dikatakan sebagai proses rekrutmen yang paling penting.

Pentingnya rekrutmen politik sebagai salah satu fungsi partai yang berorientasi dalam merekrut kader-kader partai untuk kelangsungan partai politik.

Menurut Sunggono(1992:13):

“bahwa dalam rangka menjalankan fungsi rekrutmen, partai politik biasanya berusaha untuk menarik minat para warga negara agar bersedia menjadi aktivis partai, dengan jalan demikian, maka partai politik sebenarnya turut serta pula dalam meluaskan partisipasinya warga negara dibidang politik, caranya dengan melalui kontak-kontak secara pribadi, persesuai dan sebagainya. Dengan rekrutmen politik itu, partai dapat menyeleksi anggota-anggota ataupun aktivis-aktivisnya yang berbakat untuk dipersiapkan sebagai kader pemimpin dimasa depan yang akan menggantikan pemimpin yang lama (selection of leadership).”

Seperti yang diungkapkan oleh Sunggono diatas dapat disimpulkan bahwa rekrutmen memiliki peranan yang sangat strategis karena: 1) dapat menghimpun massa sebanyak-banyaknya inilah yang nantinya akan memberikan dukungan pada partai politik untuk menjadi pemenang dalam pemilihan umum, dan 2) parpol juga akan mendapatkan kader yang nantinya akan menjadi penggerak partai, pengkoordinasi massa, dan menjamin kelangsungan hidup partai.

Apabila partai politik mengalami kegagalan dalam melakukan rekrutmen akan menyisakan permasalahan pada regenerasi partai. Karena rekrutmen politik seharusnya menghasilkan kader yang siap untuk ditempatkan diposisi manapun akan tetapi kenyataannya justru sebaliknya. Sesuai dengan pendapat Koirudin (2004: 107 ):

”Kegagalan partai politik untuk melahirkan para pemimpin bangsa yang berkualitas telah dicatat oleh sejarah. Kenyataannya, parpol hanya sibuk demi meraih kekuasaan tanpa diimbangi penyiapan kader partai yang matang. Mereka nyaris tidak memandang “perlu” untuk terus meningkatkan kualitas para kader dan pemimpin-pemimpin yang mereka miliki. Pola kaderisasi yang masih setengah hati, serampangan, dan miskin konsep seolah menjadi identitas yang tepat bagi keseriusan pembangunan SDM dalam sebuah parpol. Kenyataan lagi menunjukkan bahwa kondisi parpol semakin parah manakala ia hanya berorientasi utama mendulang suara sebanyak mungkin tanpa dibarengi dengan upaya peningkatan kualitas kadernya. Kader-kader partai yang muncul akhirnya menjadi pemimpin yang karbitan. Kualitas para pemimpin yang dihasilkan oleh partai terasa memprihatinkan”.

Dapat disimpulkan bahwa pentingnya rekrutmen dalam partai politik guna mendapatkan kader yang nantinya akan menjadi penggerak partai, pengkoordinasi massa, dan menjamin kelangsungan hidup partai. Akan tetapi jika sistem rekrutmen partai politik ini gagal maka partai politik tidak akan mendapatkan kader-kader yang lebih baik untuk regenerasi partai itu sendiri.

Berkembangnya partai Islam di Indonesia setidaknya didasarkan pada beberapa alasan, seperti realitas sosial bahwa Islam berkembang dalam sebuah Negara yang memiliki basis agama yang kuat. Selain itu, Islam juga mempunyai visi dan ideologi yang memungkinkan dimasukan dalam kehidupan berpolitik dan berbangsa. Seperti Negara modern, politik Islam di Indonesia ini masuk kedalam sistem partai. Proses sejarah partai politik Islam menuai dinamika tersebut antara lain sebagian penduduk Indonesia yang tidak hanya penganut agama Islam saja didalamnya.

Kehadiran partai atas nama agama Islam di Indonesia akan semakin menambah dinamika *pluralisme* partai politik di Indonesia. Maka dari itu, dilihat dari berbagai fenomena politik di Indonesia ini mengapa suara partai Islam ini lebih rendah dibandingkan partai Nasional lainnya, apakah hal ini disebabkan karena ideologi partai Islam yang kurang sependapat dengan mereka yang berbeda keyakinan.

Namun, banyak sekali terdapat permasalahan dalam proses rekrutmen yang di lakukan oleh partai politik, terkadang partai politik merekrut tanpa melihat pengetahuan dan keahlian mereka terutama yang berkaitan dengan dunia politik. Dalam sistem rekrutmen partai politik sangat memerlukan banyak pertimbangan yang harus diperhatikan.

Menurut Abdul (2006:12-14), Partai Persatuan Pembangunan yang merupakan sebagai hasil fusi dari empat partai Islam: Partai Nadhlatul Ulama, Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII) dan Partai Islam (Perti) yang di deklarasikan pada tanggal 5 Januari 1973 bertepatan dengan 30 Dzulqalah 1392 Hijriyah

merupakan partai politik penerus empat partai Islam dan wadah aspirasi umat Islam, serta cermin kesadaran dan tanggung jawab bagi tokoh-tokoh umat Islam dan Pimpinan partai untuk bersatu, bahu-membahu membina masyarakat agar lebih meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'aa melalui perjuangan politik.

Partai Persatuan Pembangunan pembentukan dilakukan oleh lima deklarator yang merupakan pimpinan empat Partai Islam peserta Pemilu 1971 dan oleh ketua kelompok persatuan pembangunan (fraksi empat partai Islam di DPR), yaitu: KH Idham Chalid (Ketua Umum PB Nadhatul Ulama), H. Mohammad Syafaat Mintaredja, SH., Ketua Umum Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), Haji Anwar Tjokroaminoto, Ketua Umum PSII, Haji Rusli Halil, Ketua Umum Partai Islam Perti dan Haji Maskur, Ketua Kelompok Persatuan Pembangunan di DPR (Hamza Haz, 2002:19).

Partai Persatuan Pembangunan mempunyai karakteristik sebagai partai politik masa yang begitu banyak. Secara ideologis, Partai Persatuan Pembangunan menentukan pilihannya sebagai partai Islam. Dalam Partai Persatuan Pembangunan sendiri dinilai mempunyai kader masa yang lebih militan dan cukup mempunyai loyalitas yang sangat kuat dibanding lainnya.

Pada tahun 2019, Partai Persatuan Pembangunan yang diketahui oleh Suryadarma Ali dan Ketua DPC Yogyakarta Fauzi berusaha meningkatkan kredibilitas publik melalui sistem rekrutmen yang solid. Partai ini mempunyai basis yang banyak di Yogyakarta serta Partai Persatuan Pembangunan sendiri dianggap mempunyai peran aktif dalam mengikuti dunia politik di daerah lainnya. Jelas hal itu yang akan turut mempengaruhi bagaimana sistem rekrutmen yang akan dilakukan oleh DPC PPP Kota Yogyakarta dengan sistem patronik, sistem merit dan sistem karir untuk mendapatkan suara yang banyak guna mendapatkan kursi di Legislatif.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas menarik untuk di teliti lebih lanjut, maka dengan demikian penulis memilih judul “**Sistem Rekrutmen Partai Islam di Indonesia : Studi Kasus DPC PPP Kota Yogyakarta**”.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana sistem rekrutmen DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta?

## **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan pada penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana pola sistem rekrutmen DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mempengaruhi rekrutmen DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta..

## **D. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Teoritis:**

Hasil dari penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran dan ilmu pengetahuan di dunia pendidikan, khususnya dalam bidang ilmu sosial dan politik.

### **2. Manfaat Praktis:**

Manfaat yang dihasilkan dari penelitian ini yaitu diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi kepada elit politik dalam merekrut dan mengaderisasi calon anggota yang akan menjadi caleg khususnya.

## **E. Penelitian Terdahulu**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, ada beberapa yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Penelitian yang pertama yang berhasil peneliti temukan adalah penelitian yang dilakukan oleh Rahmadania (2014) yang berjudul “Rekrutmen Calon Legislatif Pada Pemilu 2014 (Studi Kasus Mengenai Rekrutmen Politik Partai Persatuan Pembangunan di Dapil I dan V di Kabupaten Sampang, Jawa Timur.

Penelitian ini membahas tentang bagaimana proses rekrutmen calon legislatif dan adanya perbedaan antara proses yang ada di Dapil I dan Dapil V. Hal ini menjadikan adanya pertimbangan pada proses rekrutmen politik di Kabupaten Sampang tersebut.

Penelitian selanjutnya adalah penelitian dari Waskita Aji, Asy'ari & Tyesta (2016) yang berjudul "Optimalisasi Tata Cara Partai Politik Dalam Rekrutmen Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Untuk Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012". Berdasarkan hasil yang diperoleh dalam penelitian ini rekrutmen politik yang terjadi pada pemilu 2014 belum berjalan dengan baik karena masih ada kesan asal pilih pada pemilihan kader-kader yang maju dalam pemilu 2014.

Pada penelitian Panantang, Winarno & Awaliyah (2014) berjudul "Model Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan DPC PDIP Kota Kediri". Hasil penelitian tersebut strategi rekrutmen yang diterapkan oleh PDIP ada 2 jalur, yang pertama keinginan individu dan yang kedua dicalonkan melalui partai itu sendiri. Selanjutnya model kaderisasi yang digunakan PDIP adalah model kaderisasi gerakan, disisi lain PDIP mempunyai suatu kendala dalam proses rekrutmen yang terletak pada kemampuan anggota baru.

Penelitian Prakoso (2017) yang berjudul "Analisis Rekrutmen Dan Kaderisasi Partai Politik Pada Fenomena Calon Tunggal Petahanan Studi Kasus: Pilkada Kabupaten Pati 2017". Penelitian ini berisikan tentang prosesi pemilihan kepala daerah di Kabupaten Pati karena hanya diikuti oleh satu pasang calon saja, hal ini terjadi karena seorang petahanan sangatlah kuat dan memiliki efektivitas yang sangat tinggi.

Selanjutnya, Penelitian Mahadi (2011) berjudul "Pragmatisme Politik, Studi Kasus Proses Rekrutmen Politik PDIP Pada Pilkada, Kabupaten Sleman". Isi dari penelitian ini menjelaskan bagaimana proses rekrutmen kandidat Bupati Sleman. Ukuran kandidat yang

terekrut adalah berbasis popularitas dan mempunyai uang. Dampaknya adalah orang luar tidak bisa mengintergrasikan kader partai.

Penelitian Triasa (2012) berjudul “Sistem Kaderisasi Partai Golkar Era Reformasi (Studi Kasus Di Dewan Pimpinan Daerah Partai Golkar Provinsi Jawa Tengah)”. Tujuan penelitian ini mengetahui pola rekrutmen yang dijalankan oleh partai Golkar dalam merekrut calon anggota partai Golkar, mengetahui kaderisasi yang dilakukan partai Golkar guna melahirkan kader-kader partai sesuai paradigma baru di partai Golkar. Penelitian ini, menunjukkan bahwa pola rekrutmen partai Golkar di Era Reformasi bersifat terbuka dan tidak menyiapkan tim seleksi dalam rekrutmen calon anggota partai.

Penelitian Fajrina (2017) berjudul “Strategi Rekrutmen Partai Gerindra Dalam Kaderisasi Pemuda Di Kota Surabaya”. Isi dari penelitian ini Partai Gerindra mempunyai beberapa strategi dalam melakukan rekrutmen kader muda, diantaranya adalah sistem terbuka akan tetapi partai Gerindra juga menggunakan sistem *Patronase*.

Utaria (2008) yang berjudul “Tipologi Politik Partai Islam Di Indonesia Kontestan Pemilu 2004”. Dalam kajian ini penyusun berupaya untuk menjelaskan tipologi dan polarisasi pemikiran politik dari partai politik Islam yang lahir pasca ordebaru terutama kontestan pemilu tahun 2004. Seperti yang diketahui partai Islam telah menjadi bagian dari perjalanan demokrasi di negeri ini.

Fajri (2017) dengan skripsi yang berjudul “Sikap Masyarakat Terhadap Partai Politik Islam (Studi Kasus Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung)”. Penelitian ini membahas tentang bagaimana sikap masyarakat kelurahan Korpri Jaya, terhadap partai politik Islam tersebut. Dari jumlah sampel dihasilkan masyarakat yang bersifat positif terhadap partai Islam sebesar 48%, yang bersikap biasa sebesar 36% dan yang bersikap negatif ada 15%.

Terakhir penelitian Romli (2004) dalam hal ini pada era reformasi muncul kembali partai yang berasaskan Islam. Adapun beberapa faktor penyebab munculnya partai Islam tersebut. Pertama, faktor teologis yang melahirkan doktrin bahwa agama tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik. Kedua, faktor sosiologis dimana umat Islam Indonesia mayoritas sehingga perlu adanya wadah untuk mereka. Ketiga, faktor historis dimana keberadaan partai Islam tidak bisa lepas dari sejarah masalah dimana partai Islam telah ada dan ikut andil dalam perjuangan bangsa Indonesia. Keempat, faktor reformasi yang melahirkan kebebasan dan demokratisasi dimana setiap golongan dan kelompok dibuka peluang untuk mendirikan atau membentuk partai politik.

**Tabel 1**

Hasil Penelitian Terdahulu

No	Jenis Pengelompokan	Temuan/Hasil
1	Sistem Rekrutmen	Rahmadania (2014), Aji, Asy'ari & Lita (2016), Mahadi (2011), Fajrina (2017) menjelaskan bagaimana proses rekrutmen calon legislatif dan adanya perbedaan antara proses rekrutmen yang ada di dalam satu partai politik dengan partai politik lainnya.
2	Partai Islam	Utaria (2008), Fajri (2017), Romli (2004) dalam hal ini menjelaskan bagaimana sejarah partai politik Islam di Indonesia dan Islam tidak bisa dipisahkan dari kehidupan politik.

Dalam penelitian-penelitian terdahulu diatas, dapat disimpulkan bahwa masing-masing peneliti membahas tentang sistem rekrutmen yang digunakan oleh partai politik untuk memperoleh calon anggota yang terbaik. Sedangkan penelitian yang saya teliti ada beberapa kesamaan dengan penelitian terdahulu yaitu meneliti mengenai Rekrutmen didalam partai politik. Akan tetapi saya ingin memfokuskan ke arah partai politik Islam yang ada didalam tubuh Partai Persatuan Pembangunan yang ada di DPC Kota Yogyakarta.

## **F. Kerangka Teori**

### **1. Sistem Rekrutmen**

#### 1.1 Pengertian Sistem Rekrutmen

Fungsi inti partai politik adalah rekrutmen politik. Undang-Undang Partai Politik No. 2 tahun 2011 pada Pasal 29 Ayat (2) Bab XI tentang Rekrutmen Politik yang berbunyi Rekrutmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara demokratis dan terbuka sesuai dengan AD dan ART serta peraturan perundang-undangan.

Mas'oe d (dalam Hesel, 2003: 188) bahwa rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksi rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintah melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk mengisi jabatan tertentu serta pendidikan dan ujian.

Sejalan dengan Budiarto (2009: 408) rekrutmen politik berkaitan erat dengan masalah seleksi kepemimpinan, baik kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang lebih luas. Rekrutmen politik didefinisikan sebagai sebuah proses mencari atau mengajak orang yang mempunyai bakat untuk aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai dengan mempunyai kader-kader yang baik, partai tidak akan sulit untuk menentukan pemimpinnya sendiri dan mempunyai peluang lebih besar mengajukan calon ke jenjang nasional.

Menurut Ramlan Surbakti (2010: 118) memberikan penjelasan mengenai rekrutmen politik, sebagai berikut:

Seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya, dengan menghususkan kepada orang-orang yang mempunyai bakat yang cukup menonjol, partai politik menyeleksi dan menempatkannya sebagai seorang calon pemimpin baik dalam skala nasional maupun dalam kewilayahan.

Sedangkan menurut Afan Gofar (199:155-156) Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur-prosedur yang berbeda dalam proses rekrutmen yang selalu bermakna. *Pertama,*

adanya seleksi untuk menempati posisi-posisi di pemerintahan. *Kedua*, memanfaatkan peran masyarakat non politik agar dapat memainkan peran-perannya.

Rekrutmen politik memiliki suatu pola-pola dalam konsepnya. Pola-pola yang terkandung dalam rekrutmen politik memiliki sistem nilai, basis dan stratifikasi sosial yang ada. Rekrutmen politik memiliki sifat khusus di dalamnya, contoh untuk perekrutan tempat-tempat tertentu harus berdasarkan hubungan kedekatan, dalam arti kedekatan seseorang menjadi acuan untuk menempati posisi tersebut.

Morgensten dan Siavelis (2008: 12), analisis rekrutmen politik terdiri atas dua variabel, yaitu variabel hukum dan partai.

Sedangkan Norris membagi rekrutmen dengan empat analisis yaitu:

- a. Analisis pada sistem politik yang terdiri dari sistem hukum, politik dan kepartaian
- b. Proses analisis demokrasi internal partai
- c. Analisis terhadap kandidat
- d. Level analisis selector.

Czudnowski (dalam Pamungkas, 2011: 91) rekrutmen politik merupakan proses dimana individu atau kelompok dilibatkan dalam peran politik aktif. Sedangkan Almond (dalam Romli, 2005:78) mengartikan fungsi rekrutmen politik sebagai penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu, pendidikan, dan ujian.

Dari pengertian diatas maka dapat disimpulkan bahwa rekrutmen politik adalah dimana proses dimana partai politik memilih dan mengangkat tokoh-tokoh politik yang kemudian mengenalkan mereka ke dalam peranan khusus sistem politik dan berpartisipasi dalam proses politik. Tujuan dari rekrutmen politik ini adalah pengisian jabatan politik dengan melibatkan partisipasi masyarakat untuk berperan aktif dalam kegiatan politik. Rekrutmen ini juga diharapkan mampu menciptakan suatu sistem politik yang dapat memberikan pelayanan dan

perlindungan terhadap masyarakat, namun tidak melupakan aktor yang ikut serta didalamnya dan harus memiliki kualitas dan serta melalui proses yang disarankan dengan latar belakang yang jelas.

## 1. 2 Sistem Rekrutmen Politik

Menurut Miftah Thoha (2003:189) bahwa ada tiga sistem yang sering digunakan dalam proses rekrutmen. Pertama, sistem patronik (*patronage system*). Sistem patronik dikenal sebagai sistem kawan, karena dasar pemikirannya dalam proses rekrutmen berdasarkan kawan, ikatan kerabat, dan keluarga. Sistem kawan ini juga didasarkan atas dasar perjuangan politik karena memiliki satu pemikiran yang sama.

Kedua, sistem merit (*merit system*). Sistem ini berdasarkan kecakapan seseorang untuk menduduki jabatan tertentu sehingga sistem ini lebih bersifat objektif karena atas dasar pertimbangan kecakapan. Penilaian objektif tersebut pada umumnya menggunakan ijazah pendidikan, sistem seperti ini dikenal dengan "*spoil system*".

Ketiga sistem karir (*career system*). Sistem ini sudah lama dikenal dan dipergunakan secara luas untuk menunjukkan pengertian suatu kemajuan seseorang yang dicapai lewat usaha yang dilakukannya secara dini dalam kehidupannya.

Pola-pola rekrutmen politik juga merupakan indikator yang penting untuk melihat pembangunan dan perubahan dalam sebuah masyarakat politik. Pola-pola rekrutmen politik mengungkapkan peroses pergeseran ekonomi, infrastruktur politik, serta derajat politisasi dan partisipasi politik masyarakat. Sistem rekrutmen politik memiliki keseragaman politik yang tiada terbatas, namun pada dasarnya ada dua cara khusus seleksi pemilihan yakni melalui kriteria universal dan kriteria partikularistik.

Syamsuddin (2005: 8), Perekrutan anggota oleh partai politik secara langsung mencakup tiga tahap yaitu:

- a. Penjaringan calon, dimana dalam tahapan ini mencakup interaksi antara elite partai politik di tingkat desa/kelurahan atau ranting partai dengan elite partai di tingkat atasnya atau anak cabang.
- b. Penyaringan atau seleksi calon yang telah dijarang. Tahapan ini meliputi interaksi antara elite tingkat anak cabang dan elite tingkat kabupaten atau cabang daerah.
- c. Penetapan calon berikut nomor urutnya. Tahapan ini melibatkan interaksi antara elite cabang daerah, terutama pengurus harian partai tingkat cabang/daerah dengan tim kecil yang dibentuk dan diberikan wewenang menetapkan calon legislatif.

Perlakuan partai politik terhadap keseluruhan tahap-tahap rekrutmen politik sangat berhubungan dengan pengorganisasian partai politik. Hal tersebut melahirkan pengelolaan partai terhadap pola rekrutmen partai politik, biasanya cara partai melakukan tahapan tahapan dari rekrutmen politik tersebut mempunyai pola yang berbeda antara partai satu dengan yang lainnya.

Sejalan dengan Leijenar dan Niemaler (1995: 77) ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni sebagai berikut:

- a. Karakteristik kemampuan yang meliputi: pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias yang tinggi serta mengetahui tentang isu-isu politik.
- b. Karakteristik yang melekat: jenis kelamin, etnis, dan penampilan.
- c. Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas, dukungan massa politik, dan organisasi masyarakat.
- d. Agama, norma, dan nilai meliputi: ketaatan beragama, kepedulian, dan kestabilan kehidupan dalam rumah tangga.

- e. Pengalaman politik meliputi: Pengalaman politik dan pengalaman sebagai kerja partai.

Adapun mekanisme rekrutmen politik partai yang disampaikan oleh Rush dan Althoff (2007: 247) itu dibagi menjadi dua. Pertama, rekrutmen terbuka yaitu sistem yang berdasarkan pada ujian-ujian terbuka. Cara rekrutmen tersebut dinilai sangat kompetitif karena nantinya partai politik mampu menilai kemampuan anggotanya untuk dapat bersaing di dunia politik dan ini sesuai dengan paham demokrasi.

Kedua, rekrutmen tertutup, yaitu suatu sistem perekrutan administratif yang didasarkan atas *patronase*. Partai berkedudukan sebagai promotor elit yang ditampilkan. Cara ini kurang kompetitif jika dilihat dari prosedurnya. Hal ini menyebabkan demokrasi berfungsi sebagai sarana elit memperbaharui legitimasinya di partai. Rekrutmen politik memiliki suatu pola dalam konsepnya.

Hisbuan (2006: 52) cara rekrutmen yang dilakukan partai politik biasanya dikenal dengan dua metode yakni:

- a. Metode ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan berdasarkan pedoman tertentu dan mempunyai standar-standar tertentu.
- b. Metode non ilmiah yakni rekrutmen yang dilakukan dengan tidak mengacu standar-standar tertentu, melainkan didasarkan ada perkiraan saja.

Sejalan dengan Leijenar dan Niemaler (1995: 77) ada beberapa faktor yang dipertimbangkan oleh partai politik dalam menentukan calon legislatifnya yakni sebagai berikut:

- f. Karakteristik kemampuan yang meliputi: pembicara yang baik, mempunyai keahlian khusus, memiliki semangat dan antusias yang tinggi serta mengetahui tentang isu-isu politik.
- g. Karakteristik yang melekat: jenis kelamin, etnis, dan penampilan.

- h. Tingkat orientasi lokal meliputi: komitmen pada daerah pilihan, popularitas, dukungan massa politik, dan organisasi masyarakat.
- i. Agama, norma, dan nilai meliputi: ketaatan beragama, kepedulian, dan kestabilan kehidupan dalam rumah tangga.
- j. Pengalaman politik meliputi: Pengalaman politik dan pengalaman sebagai kerja partai.

Maka dari itu, dari yang peneliti jelaskan diatas, mengenai definisi rekrutmen politik, kemudian tahapan rekrutmen politik, sampai pada prosedur dan sifatnya. Kecenderungan dalam penelitian ini akan lebih mendekati kepada sifat dalam rekrutmen politik terhadap demokrasi internal partai. Dikarenakan tema penelitian ini lebih merujuk kepada sosok figur anggota legislatif, yang dimana juga merupakan ketua partai.

Maka dari itu, dari yang peneliti jelaskan diatas, mengenai definisi rekrutmen politik, kemudian tahapan rekrutmen politik, sampai pada prosedur dan sifatnya. Kecenderungan dalam penelitian ini akan lebih mendekati kepada Sifat dalam rekrutmen politik terhadap demokrasi internal partai. Dikarenakan tema penelitian ini lebih merujuk kepada internal partai, yang dimana juga merupakan ketua partai. Maka pendekatan pada sistem demokrasi pada internal partai lebih tepat untuk dilihat mengenai sifat proses rekrutmen politik di Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta seperti apa. Untuk itu, dalam rancangan penelitian peneliti rangkum masing-masing indikator yang akan digunakan pada penelitian di sub bab kerangka berpikir.

### 1.3 Prinsip Rekrutmen

Menurut Bakti & Nurhasim Ada 10 prinsip rekrutmen yang harus menjadi pedoman partai politik, yaitu (Nusa Bakti & Nurhasim, 2016: 61):

1. Loyalitas. Loyalitas kepada partai politik menjadi salah satu prinsip yang harus dimiliki para kader partai politik atau anggota baru dari partai politik tersebut. Dalam hal ini,

seperti kader partai yang telah lama berjuang bersama partainya dan juga memiliki kesetiaan terhadap partai politik itu sendiri.

2. Bersih. Dalam artian para anggota, kader, dan pengurus partai politik harus memiliki norma sosial yang baik di dalam masyarakat, juga harus mementingkan kepentingan publik, karena pada akhirnya para anggota, kader, dan pengurus partai politik tersebut berkesempatan untuk memegang jabatan politik di legislatif ataupun di tatanan pemerintah.
3. Transparan/terbuka. Hal ini, sebuah partai politik harus transparan atau terbuka dalam hal mekanisme rekrutmen, profil politisi, dan partai politiknya sendiri, serta adanya transparansi dari sisi kualitas pendidikan maupun kemampuan ekonomi untuk para politisi partai.
4. Akuntabilitas. Dalam prinsip akuntabilitas ini diharapkan bahwa partai politik bisa terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan dalam proses rekrutmen politiknya kepada masyarakat. Dengan demikian, partai politik akan berupaya untuk menghadirkan individu-individu yang berkualitas, tidak hanya untuk membesarkan partai namun juga patut menurut masyarakat.
5. Meritokrasi. Dalam hal rekrutmen pengurus partai dan pejabat publik, partai politik seharusnya mengenyampingkan mekanisme rekrutmen yang didasarkan atas kedekatan personal, termasuk kultural dan kekeluargaan.
6. Demokratis. Dalam proses rekrutmen sendiri, hal ini diharuskan memiliki prinsip demokratis dalam hal pemilihan pada proses rekrutmen. Bukan hanya oleh segelintir elite, akan tetapi anggota partai dapat berpartisipasi dalam proses tersebut.
7. Desentralisasi. Prinsip desentralisasi ini adalah prinsip yang di mana setiap seleksi calon legislatif oleh pengurus di tingkat pusat dan daerah dilakukan secara proporsional. Seperti pengurus partai di daerah tidak dapat menyeleksi kandidat tanpa intervensi

pimpinan pusat partai politik tersebut. Begitu sebaliknya, pimpinan pusat partai tidak seharusnya menentukan seorang kandidat tanpa ada pertimbangan dari anggota atau pengurus partai di tingkat daerah.

8. Kecukupan biaya (*financial-sufficiency*). Tentu, calon pengurus anggota partai harus mengeluarkan biaya untuk kepentingan partai, seperti kampanye calon secara mandiri. Biaya tersebut bisa dari iuran partai politik. Selain untuk kepentingan kampanye, iuran partai ini untuk meningkatkan kualitas dalam organisasi.
9. Humanis. Prinsip dalam rekrutmen ini menekankan pada keterbukaan akses bagi siapa saja tanpa memperhatikan status sosial-ekonomi. Prinsip ini juga menekankan pada orientasi output dan outcome dari rekrutmen yang mengarah pada empati terhadap lingkungan sosial, kemiskinan, serta empati pada minoritas.
10. Non-partisipan. Dalam hal ini, penyeleksi harus memperlakukan calon legislatif dan eksekutif dengan hak yang sama, seperti tidak melakukan diskriminasi, serta mengistimewakan calon-calon tertentu

## **2. Partai Islam**

Sejarah partai islam menunjukkan bahwa negara itu di butuhkan dalam rangka pembangunan dakwah, terdapat beberapa hubungan antara Agama dan Negara dalam Islam disamping itu Islam ini mempunyai sebuah kekuatan dibidang politik. Dalam proses sejarahnya, partai Islam menuai dinamika perpolitikan. Hal ini tidak terlepas dari pluralnya penduduk Indonesia yang bukan hanya Islam saja di dalamnya. Kehadirannya partai atas nama agama di Indonesia semakin menambah dinamika dalam pluralisme di Indonesia. Oleh beberapa kalangan kehadiran partai atas nama agama ini menjadikan polemik dalam negara ini.

Maarif (2012: 3) hal ini dikarenakan dengan adanya partai yang berhaluan tertentu sehingga menjadikan sebuah partai politik masuk kedalam politik aliran atau politik identitas.

Ismail (1996: 155) Partisipasi muslim dalam bidang politik telah menghiiasi politik di Indonesia, tercatat sejak tahun 1929 Partai Serikat Islam Indonesia berdiri sebagai wadah perjuangan untuk merebut kemerdekaan dari penjajah.

Kemudian pada tahun 1945 berdiri sebuah Islam Masyumi sebagai salah satunya wadah perjuangan Umat Islam di bidang politik, meski kemudian partai ini terpecah dengan keluarnya NU dan PSII. Belum usai dengan dinamika politik aliran, partai Islam harus berhadapan oleh kebijakan pemerintah yang ada. Contohnya pada pemerintahan Orde Baru yang dimana partai politik hanya di bagi menjadi tiga partai saja. Munculnya era reformasi membuka kebebasan berartai yang perkembangannya diwarnai dengan banyaknya partai yang berdiri mengatasnamakan agama terutama Islam .

Dengan hadirnya ideologi partai politik Islam di Indonesia dan tidak akan bisa dipisahkan dengan semakin pesatnya perkembangan politik umat Islam di Indonesia terutama sejak pasca reformasi. Runtuhnya kekuasaan presiden Soeharto tahun 1998 sangat memberikan peluang yang besar bagi umat Islam untuk berusaha memaksimalkan kondisi politik yang ada. Di sisi lain yang bersamaan, Habiebie mengeluarkan kebijakan politik guna mendukung proses demokrasi di Indonesia. Kebijakan yang di bentuk oleh Bapak Habibie ini tentunya memberikan dampak yang sangat berarti bagi dinamika politik baru. Selain ditandai dengan lahirnya partai-partai Islam, era reformasi ini yang dimulai dengan Habibie menjadi Presiden juga ditandai dengan tumbuhnya organisasi-organisasi Islam di Indonesia.

Perubahan dalam dinamika perpolitikan Indonesia khususnya yang terjadi pada partai politik Islam masa ke masa, semakin menunjukkan model yang selalu berbeda. Fenomena ini dapat kita lihat dari beberapa tokoh atau ormas Islam yang mendeklarasikan partai politik meski hanya sebagian yang mencantumkan Islam sebagai azas partai. PPP, PKB, PKS dan PAN.

Oleh karena itu, dapat membuka peluang hadirnya partai politik Islam untuk terlibat di dalam persoalan bangsa. Kehadiran partai politik Islam sangat berguna bagi simpatisan agar dapat menyalurkan aspirasi umat melalui jalur konstitusional melalui wakil yang terpilih dan menduduki parlemen. Sudirman (2001: 18) ada sebuah faktor yang menyulitkan penyatuan partai Islam adalah bahwa basis Islam saling berbeda ke dalam organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, MUI dan yang lainnya. Kesulitan menyatukan partai-partai Islam selain disebabkan oleh faktor tersebut juga dengan sejarah.

Dengan pemaparan sejarah partai Islam diatas, maka para ahli mengemukakan pendapat partai Islam. Partai Islam Maududi ( dalam Mahendra, 1999) yaitu partai yang memiliki tujuan untuk menegakkan kedaulatan tuhan dimuka bumi dan menjadikan Islam sebagai jalan hidup di dunia. Tokoh atau para elit partai akan dikhususkan kepada orang yang bersungguh-sungguh dalam menjalankan keimanan dan ketaqwaan. Sedangkan, Alhamdi (2013: 9) partai Islam dapat dipahami sebagai organisasi publik yang memperjuangkan nilai-nilai Islam dalam konteks yang berbeda-beda melalui penguasaan struktur kelembagaan pemerintah baik pada level legislatif maupun eksekutif.

Pembahasan selanjutnya mengenai partai Islam Sudirman (2001:18) untuk menyebut suatu partai politik itu partai Islam dia harus memiliki ciri Islam pada salah satu dari tiga unsur yakni: nama, azas dan lambang. Suatu partai disebut partai Islam apabila namanya mengandung unsur Islam atau azasnya Islam atau lambangnya mengandung ciri Islam.

Ikrar (2003: 3) partai Islam adalah suatu perkumpulan yang seazas, sehaluan, dan setujuan dengan demikian, partai Islam merupakan perkumpulan atau golongan yang menjadikan agama Islam sebagai azas partai. Azyumardi (2000: 13) partai Islam dapat dilihat dari beberapa kriteria. Pertama, percantuman Islam sebagai azas partai, kedua penggunaan simbol atau gambar yang identik dengan Islam yang ketiga memiliki basis sosial terutama

dari kalangan Islam tersebut. Partai Islam juga ditandai dengan adanya suatu personalia kepemimpinan partai yang di dominasi oleh orang - orang yang berlatar belakang Islam.

Ahmad dalam kitabnya *Mu'jam al-aim al hibz* (dalam Cahyo, 2016) istilah partai dari tinjauan bahasa berarti setiap kelompok yang memiliki keinginan dan tujuan yang satu, al-hibz juga berarti pendukung seseorang dalam mengikuti pendapat, atau setiap kaum yang mengikuti pendapat, atau setiap kaum yang bersatu dalam cita-cita perbuatan.

Al-Hamdi (2013: 9) sebagai partai yang menggunakan label dan atribut Islam serta mewakili kaum Muslim, partai Islam harus mendasarkan seluruh program dan kegiatan organisasinya pada prinsip-prinsip dasar partai berikut ini:

- a. Berpedoman pada nilai-nilai Al-Quran dan As-Sunnah, yang dimaksud disini segala keputusan organisasi tidak boleh bertentangan dengan sumber ajaran agama Islam yaitu kitab suci Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW.
- b. Musyawarah. Disini dalam hal musyawarah setiap organisasi harus melalui koordinasi dan komunikasi. Karena itu, partai Islam harus bersifat kolektif dimana setiap kebijakan harus diputuskan secara bersama-sama.
- c. Berlaku adil. Setiap pimpinan dan anggota memiliki hak yang sama sesuai dengan aturan yang berlaku di masing-masing partai. Oleh karena itu partai harus membuat keputusan yang adil sehingga tidak merugikan satu pihak dan merugikan pihak yang lain.
- d. Menghargai perbedaan dan bukan perpecahan.

Selanjutnya tujuan dan fungsi partai Islam Al-Hamdi (2013: 10) ada tiga tujuan utama partai Islam yaitu:

- a. Masyarakat yang adil. Keadaan dimana seluruh masyarakat di suatu negara tidak ada yang merasa terintimidasi.
- b. Masyarakat yang makmur dan sejahtera.

- c. Masyarakat yang aman dan nyaman. Tujuan ini merupakan tujuan dari partai Islam untuk menjadikan masyarakat tidak merasa terganggu dari bentuk kejahatan maupun gangguan masyarakat sekitar.

Menurut pendapat dari beberapa ahli mengenai partai Islam, dapat ditarik kesimpulan bahwasanya secara umum partai Islam merupakan sekumpulan orang yang beragama Islam membentuk suatu organisasi politik dengan menjadikan Islam (Al - Qur'an dan Hadits) sebagai pedoman dasar perjuangan untuk menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, dan cita - cita umat Islam dalam dunia perpolitikan.

### **G. Definisi Konseptual**

Sesuai dengan judul penulis yaitu Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Islam di Indonesia (Studi kasus DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Yogyakarta) maka penulis menentukan konsep sebagai berikut:

#### **1. Rekrutmen**

Merupakan suatu cara atau proses dalam pemilihan sampai penentuan terhadap seseorang (kandidat politik) dengan tujuan untuk ikut serta dalam pertarungan politik.

#### **2. Partai Islam**

Dalam hal ini suatu secara umum partai Islam merupakan sekumpulan orang yang beragama Islam membentuk suatu organisasi politik dengan menjadikan Islam (Al-Qur'an dan Hadits) sebagai pedoman dasar perjuangan untuk menyampaikan aspirasi, ide, gagasan, dan cita - cita umat Islam dalam dunia perpolitikan.

### **H. Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan salah satu cara untuk mengukur dan mendukung dari definisi konseptual. Oleh karena itu, operasional yang peneliti gunakan yaitu sistem proses rekrutmen politik untuk studi kasus DPC Partai Persatuan Pembangunan kota Yogyakarta:

- a. Sistem patronik (*patronage system*)

- b. Sistem merit (*merit system*)
- c. Sistem karir (*career system*)

## **1. Metode Penelitian**

### **1. Jenis penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Menurut Moleong (2009: 6) penelitian kualitatif sebagai penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena apa yang telah dialami oleh subyek penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan, dan lain-lain dengan cara membentuk deskriptif dalam bentuk kata - kata dan bahasa yang alamiah dengan memanfaatkan metode alamiah. Tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah untuk memperoleh gambaran yang utuh dari suatu objek penelitian dan juga mengetahui fenomena perilaku, persepsi, tindakan dan lain-lain yang terjadi dalam proses penelitian.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis studi kasus. Menurut Creswell (2015: 135) penelitian studi kasus adalah pendekatan untuk mempelajari, menerangkan dan menginterpretasi suatu kasus melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beragam sumber informasi. Misalnya dengan wawancara, pengamatan, dokumen dan berbagai laporan.

Alasan digunakannya jenis penelitian studi kasus adalah karena metode penelitian yang digunakan merupakan metode penelitian deskriptif, dimana metode kualitatif ini dalam pelaksanaannya dapat dilakukan melalui studi kasus. Jenis penelitian studi kasus ini dipilih juga karena sifat kecenderungannya yang biasa memperhatikan permasalahan mengenai, mengapa suatu kebijakan diambil dan bagaimana pelaksanaannya, karena dalam penelitian ini yang ingin diteliti adalah tentang sistem rekrutmen dan kaderisasi partai Islam di Indonesia studi kasus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta.

Dari pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa suatu penelitian kualitatif dapat dimaksud suatu penelitian yang dilakukan secara deskriptif untuk memahami suatu fenomena di masyarakat. Penggunaan pendekatan kualitatif ini dapat dimaksud agar penelitian ini mampu mengungkap fakta di lapangan secara lebih dalam dan lebih insentif di daerah atau kabupaten yang dijadikan tempat pengambilan data baik secara primer maupun sekunder.

## **2. Obyek penelitian**

Dalam melakukan penelitian dengan judul Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Islam Indonesia (studi kasus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta), maka lokasi yang diambil adalah kepengurusan DPC Partai Persatuan Pembangunan yang berada di kota Yogyakarta.

## **3. Sumber Data**

Dalam penelitian ini suatu pihak yang dijadikan sumber data adalah pejabat yang dianggap mempunyai sebuah informasi. Lebih tepatnya narasumber yang lebih mengetahui kunci dari penelitian ini. Maka sumber data yang dipakai dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian dengan menggunakan alat pengukuran atau pengambilan data langsung dari subyek sebagai informan. Azwar (2001: 91) dalam hal ini data primer diperoleh melalui hasil wawancara, dokumentasi kepada informan yang dapat diambil informasi mengenai penelitian yang dilaksanakan .

### **b. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dari pihak lain. Dalam hal ini cara pengumpulan data melalui analisis, literatur dan peraturan - peraturan yang berkaitan dengan obyek penelitian tersebut (Azwar, 2001: 91).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

##### **a. Wawancara**

Wawancara adalah percakapan dengan suatu pihak tertentu. Moleong (2009: 186) percakapan itu dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan pihak kedua yaitu yang terwawancara yang memberikan suatu jawaban atas pertanyaan tersebut. Metode ini digunakan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya jawab secara langsung dengan narasumber yang berlandaskan pada tujuan penelitian. Wawancara ini juga menggunakan pemahaman yang dalam guna untuk mendalami suatu informasi yang akan kita gali dari seorang narasumber. Dalam penelitian ini yang akan diwawancara sebagai responden yaitu DPC PPP Kota Yogyakarta dan tokoh organisasi lainnya.

##### **b. Dokumentasi**

Teknik dokumentasi Arikunto (2002: 206) yaitu mencari data mengenai hal yang tertulis. Dokumen bisa berbentuk tulisan gambar atau karya - karya dari seseorang. Dokumen sangat berguna karena dapat memberikan latar belakang yang lebih luas mengenai pokok penelitian, dapat dijadikan bahan bacaan peneliti sebagai pembanding terhadap data tersebut. Teknik ini digunakan untuk mendapatkan data atau catatan yang terdapat di DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Tahap selanjutnya setelah data - data yang berkaitan dengan penelitian ini, maka langkah selanjutnya adalah mengolah data, mendeskripsikan dan mengambil kesimpulan. Proses analisis data dimulai dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber yaitu wawancara, pengamatan lapangan, dokumen, gambar, dan foto.

Menurut Miles & Huberman (dalam Silalahi, 2009: 339) menjelaskan bahwa analisis data penelitian kualitatif terdiri atas tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu:

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan proses pemilihan, pemusatan serta penyederhanaan yang muncul dari catatan lapangan. Data yang diperoleh lapangan dituangkan dan dikembangkan sebagai kebutuhan penelitian. Tahapan ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.

b. Penyajian data

Penyajian data merupakan sekumpulan informasi yang sudah tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data ini berguna untuk memudahkan peneliti melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian tersebut.

c. Interpretasi data

Proses yang terakhir yang tidak bisa dipisahkan adalah analisis interpretatif terhadap uraian yang telah disajikan dengan metode yang berlaku, lalu di uji sehingga mendapatkan temuan yang kemudian ditarik kesimpulan sebagai hasil dari jawaban atas rumusan masalah.

## **2. Sistematika Pembahasan**

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis dan dapat menunjukkan gambaran yang detail dalam skripsi ini, maka penulis menyusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang mendeskripsikan latarbelakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yaitu tentang Sistem Rekrutmen dan Kaderisasi Partai Islam di Indonesia (Studi Kasus DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta) dalam bab I juga memaparkan landasan teori , metode penelitian dan sistematika penulis dalam penelitian.

Bab II adalah gambaran umum, bab ini berisikan penjelasan profil atau suatu obyek yang sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Bab ini akan memaparkan profil Partai Persatuan Pembangunan dan akan menggambarkan tentang struktur organisasinya.

Bab III adalah bab yang paling utama dari jawaban rumusan masalah dalam penelitian. Pembahasan ini akan menganalisis pendapat dari berbagai tokoh yang berada di DPC Partai Persatuan Pembangunan Kota Yogyakarta mengenai sistem rekrutmen dan kaderisasi saat ini.

Bab IV merupakan bab yang terakhir, dalam bab ini akan dijelaskan kesimpulan yang diambil dari penelitian yang telah dilakukan, dan serta memberikan saran-saran yang sekiranya perlu untuk obyek penelitian berikutnya.